



**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat, Kasih sayang dan IjinNya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 telah dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

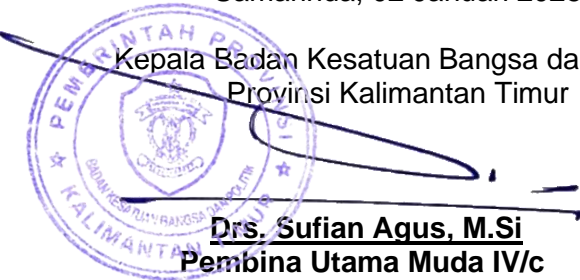
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu OPD yang memiliki tugas dan fungsi, diberi amanah oleh pemerintah dalam menjalankan program dan kegiatan untuk mendukung kemajuan pembangunan Kalimantan Timur, maka bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tersebut berupa laporan kinerja yang sesuai dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2014.

Pelaporan kinerja ini bertujuan memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 ini. Semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi kinerja bagi pihak-pihak yang memerlukan. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik yang menyangkut substansi isi maupun penulisannya. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dari semua pihak, guna perbaikan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kami untuk masa-masa yang akan datang.

Samarinda, 02 Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur



Drs. Sufian Agus, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196602041988031016

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2024. Capaian Kinerja (*performance results*) tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pada Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 3 (tiga) sasaran, dengan kategori capaian **Sangat Baik**. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai target yang telah ditetapkan, dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya Manusia	5
E. Aspek Strategis Organisasi	6
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	7
G. Sarana dan Prasarana Kerja	9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis	10
B. Indikator Kinerja Utama	15
C. Perjanjian Kinerja	17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun Sebelumnya ..	20
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	23
C. Analaisi Capaian Kinerja	25
D. Realisasi Anggaran	64

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim	70
B. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa yang Akan Datang	70

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	4
Gambar 3.1 Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik.....	37
Gambar 3.2 Kegiatan FGD IDI.....	37
Gambar 3.3 Kegiatan FGD Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah (TP3D)	37
Gambar 3.4 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	49
Gambar 3.5 Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Bagi Organisasi Kepemudaan, Pemuka Masyarakat, Dan Bagi Mahasiswa	49
Gambar 3.6 Kegiatan Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern dan Berkarakter	50
Gambar 3.7 Kegiatan Verifikasi Data Ormas Se-Kaltim	50
Gambar 3.8 Kegiatan Podcast/talkshow dengan Ormas	51
Gambar 3.9 Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat .	51
Gambar 3.10 Kegiatan Rapat Tim Terpadu Pengawasan Ormas	51
Gambar 3.11 Kegiatan Sosialisasi UMKM	52
Gambar 3.12 Kegiatan Sosialisasi Ketahanan Seni dan Budaya	53
Gambar 3.13 Kegiatan Pemeliharaan Keharmonisan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Daerah	53
Gambar 3.14 Kegiatan Sosialisasi P4GN & PN kepada Pemuda, Tokoh Agama dan Ormas.....	53
Gambar 3.15 Kegiatan Rapat Tim Terpadu Penanganan dan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.....	54
Gambar 3.16 Kegiatan Diseminasi Manajemen Konflik Bagi Aparatur Pemerintah Di Wilayah Kaltim	55
Gambar 3.17 Kegiatan Sosialisasi Peran Intelektual Muda Dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Kalimantan Timur	55
Gambar 3.18 Kegiatan FGD Pemantauan Orang Asing.....	55
Gambar 3.19 Kegiatan FGD Kewaspadaan Nasional	56

Gambar 3.20 Penghargaan Peringkat Pertama Kategori Pengelolaan Keuangan	60
Gambar 3.21 Penghargaan Peringkat Pertama Kategori Pengelolaan Kepegwaian.....	60
Gambar 3.22 Kegiatan Monitoring Evaluasi Renaca Aksi	64
Gambar 3.23 Kegiatan Pelayanan Publik	65

DAFTAR TABEL

Table 1.1	Rekap Pegawai Kesbangpol Prov. Kaltim Berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan, dan Pendidikan.....	5
Table 1.2	Rekap PNS berdasarkan Pendidikan dan Gender	6
Table 1.3	Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	7
Table 1.4	Sarana dan Prasana Kerja	9
Table 2.1	Perencanaan Strategis	11
Table 2.2	Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran	12
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama	16
Table 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	17
Table 2.5	Target Belanja Badan Kesbangpol Tahun 2024.....	18
Table 2.6	Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis	19
Table 3.1	Hasil Evaluasi Tahun 2023	20
Table 3.2	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2023	21
Table 3.3	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	24
Table 3.4	Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	24
Table 3.5	Pengukuran Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Prov. Kaltim Per Triwulan Tahun Anggaran 2024	25
Table 3.6	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	26
Table 3.7	Sumber Data Penilaian IDI pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	28
Table 3.8	Hasil penilaian skor Aspek Indeks Kapasitas Lembaga Dekomrasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023	29
Table 3.9	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	29
Table 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Renstra	30
Table 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Renstra	31
Table 3.12	Rincian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	32
Table 3.13	Rincian Bantuan Keuangan Penyelenggara Pemilu Provinsi Kaltim Tahun 2024	32

Table 3.14 Rincian Bantuan Keuangan Penyelenggara Pemilu dan Pengamanan Pemilu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	33
Table 3.15 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran..	35
Table 3.16 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024.....	38
Table 3.17 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	38
Table 3.18 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	38
Table 3.19 Daftar Data Potensi Konflik Tahun 2024	39
Table 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Renstra	42
Table 3.21 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2	44
Table 3.22 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024.....	56
Table 3.23 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	56
Table 3.24 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	57
Table 3.25 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Renstra	58
Table 3.26 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 3	61
Table 3.27 Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja	65
Table 3.28 Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan	66
Table 3.29 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Data Dukung Capaian Kinerja Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki peranan yang penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan Negara khususnya upaya untuk mempertahankan Kesatuan dan Persatuan Bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dasar pembentukan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur adalah Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah, dan keputusan menteri dalam negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan Bangsa dan Politik.

Pada tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan program dan kegiatan melalui Anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan mengacu pada dokumen perencanaan serta berdasarkan pada visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026 dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Kesbangpol atas kinerja yang dilaksanakan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sehubungan dengan hal tersebut lingkup penyusunan LKjIP akan memberikan kondisi obyektif pada tahun 2024, perencanaan strategis, target

dan pencapaian kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).

B. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah.

Pada BAB XXXIV Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 915, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

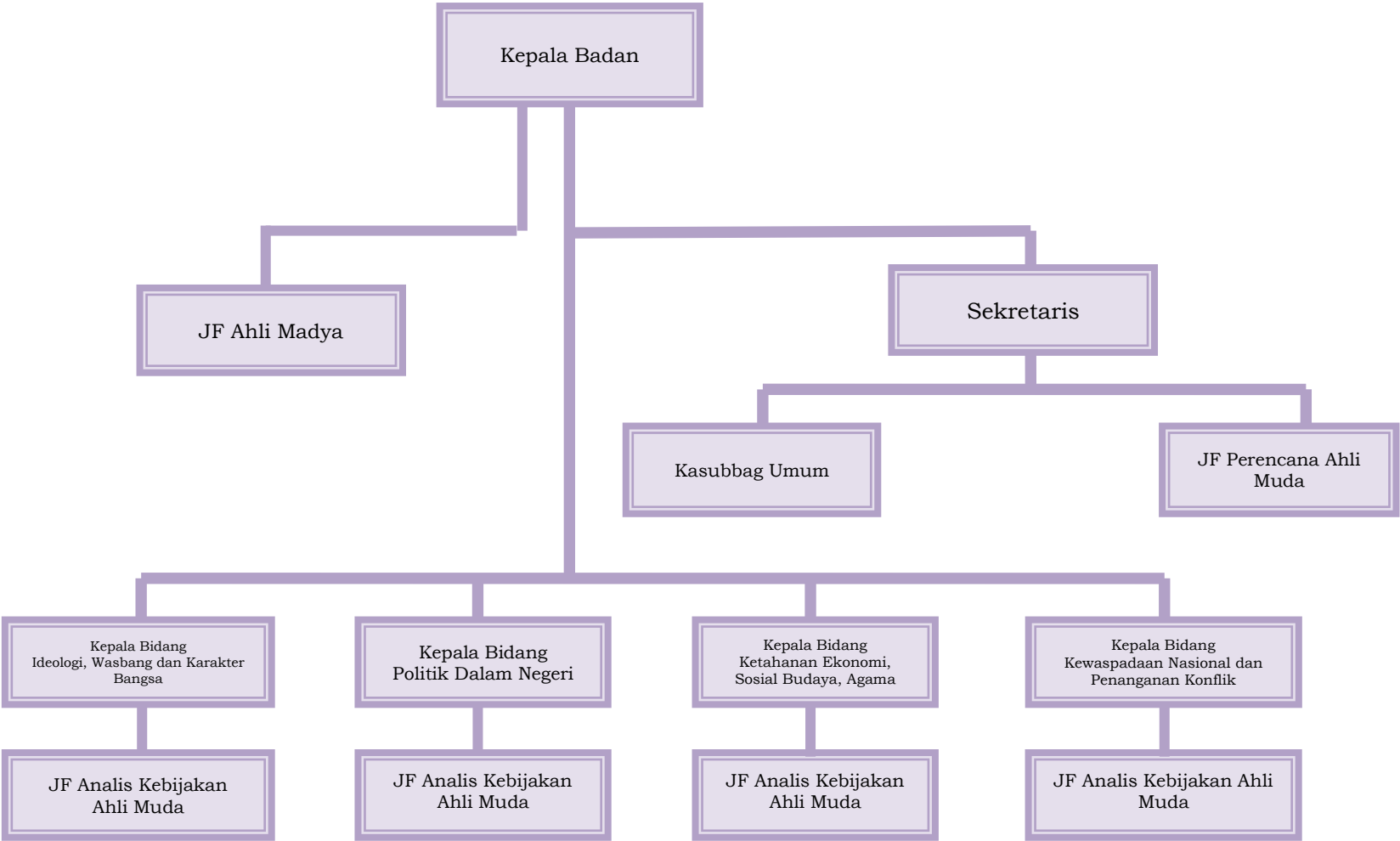
- a. perumusan kebijakan Teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang politik dalam negeri;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;

- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- k. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

C. Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris yang membawahi 1 (satu) Sub Bagian Umum dan 4 (empat) Bidang. STOK Badan Kesbangpol Prov Kalimantan Timur, dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur



D. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan kegiatan organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2024 mempunyai personil sebanyak 49 orang terdiri dari 6 pejabat struktural, 8 fungsional, 23 orang pejabat pelaksana, dan 12 orang tenaga kontrak.

Komposisi jabatan dalam struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2024 antara lain : 1 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 4 Jabatan Administrator, serta 1 Jabatan Pengawas.

Adapun rekapitulasi pegawai Kesbangpol Prov. Kaltim per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

Table 1.1 Rekap Pegawai Kesbangpol Prov. Kaltim
Berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JPT Pratama	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Administrator	3	1	4	0	0	0	3	1	0	0	0	0
Pengawas	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Fungsional	4	4	1	7	0	0	2	6	0	0	0	0
Pelaksana	18	5	0	15	8	0	0	5	2	16	0	0
Tenaga Kontrak	10	2	0	0	0	0	0	8	0	4	0	0
PNS	27	10	7	22	8	0	7	12	2	16	0	0
PNS + Tenaga Kontrak	10	2	0	0	0	0	0	8	0	4	0	0
Jumlah	49		7	22	8	0	7	21	2	20	0	0

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai Perangkat Daerah dalam pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Table 1.2 Rekap PNS Kesbangpol Prov. Kaltim berdasarkan Pendidikan dan Gender

Pendidikan	Gender		Jumlah
	Pria (P)	Wanita (W)	
1	2	3	4
S.3	0	0	0
S.2	5	2	7
S.1	6	5	11
D.IV	1	1	2
D.III	3	0	3
D.II	0	0	0
D.I	0	0	0
SLTA	12	2	14
SLTP	0	0	0
SD	0	0	0
Jumlah	27	10	37

Sumber data : Badan Kesbangpol Prov. Kaltim per Desember 2024

E. Aspek Strategis Organisasi

Penerapan manajemen berbasis kinerja (*Performance-base Management*), mengharuskan setiap instansi pemerintah dan unit organisasi/satuan kerja mampu merumuskan dan menetapkan indikator-indikator kinerja yang memenuhi kriteria indikator yang baik sebagai ukuran keberhasilan kinerja masing-masing instansi pemerintah. Acuan indikator kinerja tingkat nasional yang dapat digunakan adalah SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang dikeluarkan oleh kementerian/Lembaga, atau Lampiran I Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dengan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai PD yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, dengan menjaga stabilitas daerah agar terbebas dari ancaman dan gangguan dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban, serta meningkatkan etika berpolitik, berbudaya, berdemokrasi, dan jiwa nasionalisme. Aspek Strategis Organisasi Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- 1. Menciptakan situasi politik yang sehat bagi masyarakat dalam proses pembangunan dan meningkatkan interaksi infra struktur dan supra struktur politik.
- 2. Menciptakan masyarakat Kalimantan Timur yang berwawasan kebangsaan dalam rangka kondusifitas daerah.
- 3. Meningkatkan stabilitas sosial ekonomi yang dinamis bagi kelancaran pembangunan serta terbangunnya suatu kelembagaan sosial ekonomi di masyarakat yang kokoh.
- 4. Terwujudnya kondusifitas di daerah dengan mensinergikan peran-peran masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan.

Sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah Meningkatnya kualitas demokrasi di Kalimantan Timur.

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Permasalahan utama yang dihadapi organisasi pada Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Table 1.3 Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Terganggunya stabilitas IPOLEKSOSBUD di Kalimantan Timur	Belum optimalnya kesadaran berdemokrasi masyarakat	Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan berdemokrasi
		Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik demokrasi
	Belum optimalnya kesadaran masyarakat mengenai wawasan kebangsaan	Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan
		Masih lemahnya semangat kebersamaan dan turunnya kepedulian sosial
	Merosotnya kecintaan	Kurangnya pemahaman

	terhadap nilai-nilai seni dan budaya bangsa	nilai-nilai seni dan Budaya di masyarakat
	Meningkatnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba
	Meningkatnya penganut agama yang menyimpang	Kurangnya edukasi moderasi beragama
	Peningkatan penggunaan produk import atau penurunan penggunaan produk dalam negeri	Kurangnya edukasi cinta produk dalam negeri
	Banyaknya ormas yang tidak sesuai AD/ART	Kurangnya pembekalan dan pendampingan kepada pengurus ormas untuk menjalankan tupoksinya
	Tingginya potensi konflik sosial diwilayah Kalimantan Timur	Ego sektoral kedaerahan menyebabkan mudahnya masyarakat terprovokasi
		Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang konflik sosial
		Geografis Kalimantan Timur yang multikultural

Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang dimiliki serta visi, misi program kepala daerah dan Wakil kepala daerah, Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi, hal ini perlu dilakukan dan menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mendorong agar partisipasi lebih meningkat.
2. Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan karakter bangsa, bagi semua elemen masyarakat terutama pelajar yang ada di Kalimantan Timur.
3. Peningkatan Pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pemberdayaan organisasi masyarakat, dengan demikian kondusifitas daerah dapat terus dimantapkan.
4. Peningkatan, pembinaan dan penanganan ketentraman dan ketertiban sehingga dapat mewujudkan suasana lingkungan yang terbebas dari berbagai gangguan keamanan dan konflik sosial yang berkepanjangan. Terwujudnya suasana lingkungan yang terbebas dari berbagai macam

gangguan keamanan dan konflik sosial menjadi modal dasar dalam keberhasilan pembangunan.

G. Sarana dan Prasarana Kerja

Sebagaimana Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah merupakan tantangan kedepan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara bertahap telah menyiapkan sarana dan prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur serta sarana penunjang lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun jumlah sarana dan prasarana yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Kerja Badan Kesbangpol Prov. Kaltim Tahun 2024

No	Uraian	Banyaknya	Nilai Aset
1	2	3	4
1	Alat-alat Besar	3	33.000.000
2	Alat-alat Angkutan	51	5.220.930.500
3	Alat Bengkel dan Alat Ukir	27	138.050.000
4	Alat Pertanian	5	5.600.000
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.064	5.071.751.946
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	123	482.376.000
7	Alat-alat Kedokteran	15	3.750.000
8	Alat Laboratorium	30	47.763.152
9	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	1	227.986.550
10	Buku dan Perpustakaan	42	39.954.000
Jumlah		2.361	11.271.162.148

Sumber Data : Inventaris Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan gambaran dan arahan kebijakan sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri. Dokumen ini berfungsi untuk menuntut segenap penyelenggara kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur untuk secara konsisten melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik.

Penyusunan perencanaan strategis sebagai panduan kerja operasional yang visioner sekaligus sebagai instrumen pokok dalam keseluruhan kerangka manajemen program di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, juga dimaksudkan dalam rangka penyiapan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan, serta bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dalam periode 5 (lima) tahun kedepan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang ada dalam masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya dan kebijakan pembangunan nasional pada umumnya.

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu strategis. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Tujuan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Mengacu kepada Rancangan RPD 2024-2026, maka tujuan yang hendak dicapai, yaitu: **Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi:** yang dimaksud adalah penerapan *core value* ASN yang profesional serta mendukung pelayanan publik yang berjalan dengan standar kualitas yang baik dan inovatif sehingga mampu memberikan kepuasan layanan bagi seluruh kelompok sasaran, khususnya bagi masyarakat.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Kesbangpol dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat terukur. Indikator kinerja sasaran adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 3 (tiga) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target). Berdasarkan tujuan Rancangan RPD 2024-2026 yang telah ditentukan maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada sasaran:

Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK.

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 yang menjadi acuan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat terlihat pada tabel, antara lain:

Tabel 2.1
Perencanaan Strategis Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. th. 2023	Target Kinerja Sasaran Tahun		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan 1: Terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur yang demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur			Indeks	81,02	81,10	81,15	81,20
		Sasaran 1: Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	77,90	77,95	78,00	78,05
		Sasaran 2: Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud	Potensi Konflik	31	100	90	80
Tujuan 2: Mewujudkan	1. Indeks Kepuasan			Indeks	84,41	85,00	85,50	86,00

birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Masyarakat Pemerintah Daerah							
	2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah			Nilai	78,10	78,50	79,30	80,01
		Sasaran 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	74,26	75,00	75,50	76,00
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	66,97	68,00	68,50	69,00

Program dan kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

No	Tujuan	Sasaran Startegis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Sub Kegiatan/Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur yang demokratis	Sasaran 1: Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Sasaran 1: Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Indeks	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
		Sasaran 2: Meningkatnya persatuan dan kesatuan	Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud	Potensi Konflik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

						<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan. b. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan. c. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara d. Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila e. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka f. Pelaksanaan tugas Paskibraka g. Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila h. Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila i. Pembentukan Paskibraka
					Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. a. Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. b. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
					Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
						<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat

						Kepercayaan di Daerah.
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah c. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
2	Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Sasaran 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Nilai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD c. Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

						<ul style="list-style-type: none"> 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD d. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya d. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
--	--	--	--	--	--	---

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang muncul dalam RPJMD 2024-2026, disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	<p>Perhitungan dilakukan dengan melalui 8 variabel yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Lembaga Legislatif 2. Kinerja Lembaga Yudikatif 3. Netralitas Penyelenggara Pemilu 4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah 5. Jaminan Pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat 6. Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah 7. Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik 8. Pendidikan Politik pada kader partai politik. <p>Formulasi perhitungan :</p> $\text{Indeks Lembaga Demokrasi} = (\text{Indikator 1} \times \text{AHP Indikator 1}) + (\text{Indikator 2} \times \text{AHP Indikator 2}) + (\text{Indeks Indikator 3} \times \text{AHP Indikator 3}) + (\text{Indeks Indikator 4} \times \text{AHP Indikator 4}) + (\text{Indeks Indikator 5} \times \text{AHP Indikator 5}) + (\text{Indeks Indikator 6} \times \text{AHP Indikator 6}) + (\text{Indeks Indikator 7} \times \text{AHP Indikator 7}) + (\text{Indeks Indikator 8} \times \text{AHP Indikator 8})$	Bada Pusat Statistik (BPS)	Badan Kesbangpol Prov. Kaltim
2	Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud	Jumlah hasil pemantauan di lapangan potensi konflik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya.	Badan Kesbangpol Prov. Kaltim	Badan Kesbangpol Prov. Kaltim
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	<p>Metode pengukuran : survei kepuasan masyarakat dilakukan dengan teknik pemberian kuisioner, baik pengisian secara online, dengan pengisian sendiri maupun kuisioner dengan wawancara tatap muka.</p> <p>Alat ukur : kuesioner tentang unsur-unsur pelayanan dengan bentuk jawaban yang mencerminkan tingkat kualitas dari setiap unsur pelayanan. Angka 1 mewakili : tidak baik, Angka</p>	Badan Kesbangpol Prov. Kaltim	Badan Kesbangpol Prov. Kaltim

			2 mewakili : kurang baik, Angka 3 mewakili : baik dan Angka 4 mewakili : sangat baik. IKM = Total Nilai Persepsi Per Unsur / Total unsur yang terisi X (Nilai Penimbang)		
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai diperoleh dari hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja oleh Tim Inspektorat	Inspektorat Prov. Kaltim	Badan Kesbangpol Prov. Kaltim

Sumber Data: IKU Badan Kesbangpol Prov. Kaltim Tahun 2024-2026

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan amanah dan kesepakatan dari atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja dalam melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur akan mampu mewujudkan kesinambungan kinerja dan menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap tahunnya. Dengan Perjanjian Kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan yang lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 seperti dalam tabel 2.4:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	77,95
2	Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud	Jumlah potensi	100
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	75,00
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Niali	68,00

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	25,677,928,228	Murni + APBDP
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	16,624,125,963	Murni + APBDP
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	420,471,468,517	Murni + APBDP
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3,842,636,000	Murni + APBDP
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1,730,875,300	Murni + APBDP
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	5,614,363,950	Murni + APBDP

Sumber Data : Perubahan Perjanjian Kinerja Kesbangpol Prov. Kaltim Tahun 2024

1. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.417.755.242.529,- dan melalui mekanisme perubahan APBD tahun 2024 menjadi Rp.473.961.397.958,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 460.955.419.923,- atau sebesar 97,26%.

2. Target Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.5
Target Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024		
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	Rp. 10.895.551.146,-	Rp. 10.237.647.276,-	93,96%
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 41.766.985.253,-	Rp. 30.070.592.558,-	72,00%
	Belanja Hibah	Rp. 364.290.118.417,-	Rp. 364.290.080.089,-	100,00%
2	BELANJA MODAL			
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 46.949.530.427,-	Rp. 46.299.230.000,-	98,61%
	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 10.059.212.715,-	Rp. 10.057.870.000,-	99,99%
	Jumlah	Rp. 473.961.397.958,-	Rp. 460.955.419.923,-	97,26%

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Anggaran Belanja operasi per Sasaran Strategis
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Rp. 420.471.468.517,-	Rp. 419.599.706.808,-	99,79%
2	Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Rp. 27.812.001.213,-	Rp. 18.897.996.213,-	67,95%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	Rp. 25.677.928.228,-	Rp. 22.493.193.422,-	87,60%

Sesuai hasil evaluasi atas implementasi sistem AKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan pada tahun 2024 terdapat beberapa rekomendasi yang sudah dilaksanakan dan ditindak lanjuti, yaitu:

Tabel 3.2
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2024

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Rencana Aksi / Tindak Lanjut
1	2	3	4
1.	<p>Perencanaan Kinerja: Evaluasi atas rencana aksi kinerja yang telah dilakukan secara berkala supaya menyajikan permasalahan dan rekomendasi perbaikan dalam rangka perbaikan kinerja untuk mencapai tujuan/sasaran organisasi yang telah ditetapkan serta tindaklanjut/perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan berdasarkan rekomendasi atas semua sasaran, indicator kinerja dan targetnya.</p>	<p>Tahun 2024 kami sudah menyusun laporan monitoring evaluasi kinerja per triwulan yang memuat permasalahan, rekomendasi serta tindaklanjut perbaikan, serta telah dituangkan ke dalam aplikasi E-SAKIP Prov. Kaltim (https://e-sakip.kaltimprov.go.id/).</p>	<p>Laporan monitoring evaluasi kinerja per triwulan sudah memuat permasalahan, rekomendasi serta tindaklanjut perbaikan, serta telah dituangkan ke dalam aplikasi E-SAKIP Prov. Kaltim (https://e-sakip.kaltimprov.go.id/).</p>
2.	<p>Pengukuran Kinerja: a. Agar memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai penetapan pemberian reward dan punishment. b. Menyesuaikan strategi/Langkah dalam mencapai kinerja, menyesuaikan kebijakan, aktivitas/kegiatan serta menyesuaikan anggaran dalam mencapai kinerja. c. Agar penginputan data dasar ke dalam aplikasi E-SAKIP secara komprehensif.</p>	<p>1. Pemberian reward dan punishment kepada pegawai didasari oleh hasil kinerja. 2. Menyajikan efisiensi atas penggunaan anggaran Tahun berjalan dengan Tahun sebelumnya. 3. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi E-SAKIP.</p>	<p>1. Menyusun kebijakan internal mengadopsi Pergub Budaya Kerja No 30 th 2024 (yang memuat diantaranya kriteria atas pengukuran kinerja dalam pemberian reward dan punishment). 2. Membuat Laporan hasil monev implementasi renaksi secara berkala dilengkapi dengan uraian factor pendorong, permasalahan dan rekomendasi, tindaklanjut secara berkala per triwulan. 3. Membuat nota dinas pendampingan internal untuk memastikan tertib dalam kelengkapan isian E-SAKIP dari level JPT sampau ke</p>

			pelaksana.
3.	<u>Pelaporan Kinerja:</u> 1. Agar Laporan kinerja menyesuaikan aktivitas dan penggunaan anggaran dalam rangka mencapai kinerja. 2. Melakukan perbaikan pada Laporan LKJIP dengan menyajikan permasalahan, rekomendasi perbaikan dan tindaklanjut. 3. Melakukan perbaikan pada Laporan LKJIP dengan menyajikan informasi bahwa Laporan kinerja mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	1. Membuat Laporan kinerja yang disusun secara berkala. 2. Menyajikan efisiensi penggunaan anggaran Tahun berjalan dengan Tahun sebelumnya. 3. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi E-SAKIP.	1. Melakukan revaluasi LKJIP pertriwulan 2. Menyajikan informasi dalam Laporan kinerja (LKJIP) yang telah menyajikan informasi yang andal, akurat dan berkualitas. 3. LKJIP dimanfaatkan digunakan untuk strategi perbaikan perencanaan selanjutnya. 4. Dijadikan bahan evaluasi terhadap budaya kerja.
4.	<u>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal:</u> 1. Melaksanakan evaluasi kinerja atas capaian sasaran kinerja/program yang telah diperjanjikan (PK) secara berkala/periode untuk menilai keberhasilan capaian sasaran kinerja /program/kegiatan dan dilengkapi laporan evaluasi yang menyajikan permasalahan dan rekomendasi perbaikan kinerja agar dapat mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja. 2. Melakukan analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda. 3. Mengoptimalkan tindaklanjut atas	1. Membuat Laporan evaluasi kinerja yang disusun secara berkala yang memuat permasalahan, rekomendasi perbaikan dan tindaklanjut. 2. Melakukan perbaikan pada Laporan evaluasi rencana aksi dengan menyajikan analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda. 3. Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja LHE SAKIP Tahun 2024.	1. Membuat Laporan hasil monev implementasi renaksi secara berkala dilengkapi dengan uraian factor pendorong, permasalahan dan rekomendasi, tindaklanjut secara berkala (pertriwulan/perbulan dalam bentuk matrik memastikan tertib dalam kelengkapan isian E_SAKIP dari level JPT sampai ke pelaksanaan. 2. Menindaklanjuti semua rekomendasi SAKIP Inspektorat yang dilengkapi dengan bukti dukung yang relevan.

	rekomendasi hasil evaluasi sakip agar dapat meningkatkan implementasi SAKIP.		
5.	Capaian Kinerja: Capaian kinerja harus lebih baik dari tahun sebelumnya dan dilengkapi dengan informasi kinerja yang dapat diandalkan (mudah ditelusuri dengan data berkala).	Berkaitan hal ini, kami dalam rangka meningkatkan capaian kinerja baik output dan outcome, dengan melaksanakan evaluasi secara priodik dan melakukan monev per triwulan agar pencapaian sasaran, dan Kinerja organisasi tercapai optimal.	Melaksanakan monitoring evaluasi secara priodik, yakni bulanan, triwulan dan semester, dan dituangkan dalam Laporan monitoring evaluasi.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi adalah kinerja yang dilaksanakan oleh organisasi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Pencapaian kinerja organisasi dapat diukur berdasarkan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja adalah penilaian pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan atas penetapan kinerja sesuai program dan kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indiktator kinerja. Tujuan lainnya ialah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja, tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan dan dicapai.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024. Pengukuran tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 3 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	2	3	4
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Renstra yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian/Penetapan Kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 128,27% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Prov. Kaltim
Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	%	Kriteria/ Kode
1	2	3	4	5	8	9	
1	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	77,95	83,00	106,48%	Sangat Baik
2	Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud	Jumlah potensi	100	19	181%	Sangat Baik
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	75,00	91,78	122,37%	Sangat Baik
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	68,00	70,20	103,24%	Sangat Baik

Pengukuran capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur per Triwulan Tahun 2024 yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian/Penetapan Kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Prov. Kaltim
Per Triwulan Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	77,95	Triwulan I	0	0	100%
					Triwulan II	0	0	100%
					Triwulan III	77,95	83,00	106,48%
					Triwulan IV	0	0	100%
2	Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud	Jumlah potensi	100	Triwulan I	25	14	144%
					Triwulan II	25	2	192%
					Triwulan III	25	1	196%
					Triwulan IV	25	2	192%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	75,00	Triwulan I	0	0	100%
					Triwulan II	37,50	44,99	119,97%
					Triwulan III	0	0	100%
					Triwulan IV	37,50	46,79	124,76%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	68,00	Triwulan I	0	0	100%
					Triwulan II	0	0	100%
					Triwulan III	68,00	70,20	103,24%
					Triwulan IV	0	0	100%

Sumber Data : hasil moneyv IKU per triwulan

C. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan Penetapan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2024, yaitu terdapat 3 (tiga) sasaran, dengan 4 (empat) indikator sasaran yang akan dicapai sebagaimana target yang sudah ditetapkan dengan didukung program dan kegiatan serta anggaran dan SDM, maka pengukuran kinerja

yang sudah ditetapkan terhadap tiga sasaran dan empat indikator telah dicapai rata-rata sebesar 128,27% dengan kategori **Sangat Baik**. Pencapaian pengukuran kinerja ini dapat dilihat pada hasil analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya partisipasi politik masyarakat

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja yaitu Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi sebagai berikut:

Tabel 3.6
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Capaian skor aspek Lembaga demokrasi

Sumber data indikator diperoleh dari hasil perhitungan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) wilayah yang dirilis oleh BPS RI. Pengukuran Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi merupakan salah satu aspek dalam perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan bagian penting dari upaya mengukur dan mengevaluasi tingkat perkembangan dan penerapan demokrasi sebagai pijakan dalam proses konsolidasi kinerja demokrasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan parameter tersebut, diharapkan dapat diperoleh komparasi/kesesuaian antara progres konsolidasi demokrasi dengan jalur demokrasi yang telah diamanatkan dalam konstitusi. Kapasitas Lembaga Demokrasi (8 indikator), proses sejauh mana institusi/lembaga demokrasi berfungsi dan bekerja menjamin kebebasan dan kesetaraan. Lembaga-lembaga tersebut meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, partai politik dan lembaga independen seperti penyelenggara pemilu di pusat dan daerah.

Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60). Adapun metode pengumpulan data IDI menggunakan metode triangulasi, yakni mengombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari

metode yang satu akan memvalidasi (cross validate) data yang didapat dengan metode yang lain. Media pengumpulan data pun dapat diperoleh melalui tiga instrumen, yakni:

a. **Reviu dan Koding Media (Koran Cetak dan Portal Berita Online)**

Reviu Media merupakan metode pengumpulan data secara kuantitatif. Surat kabar cetak dan portal berita online dipilih karena media tersebut merupakan sumber informasi yang dapat menangkap berbagai fenomena demokrasi di masyarakat. Sumber ini memiliki keunggulan karena keteraturan penerbitan, sehingga bisa menggambarkan fenomena tersebut dalam satu tahun penuh.

b. **Reviu dan Koding Dokumen dan Data Resmi K/L/D/I**

Reviu Media merupakan metode pengumpulan data secara kuantitatif. Dokumen dan data resmi K/L/D/I merupakan data sekunder yang relevan dengan indikator tertentu yang diukur. Sumber ini dipilih karena memiliki validitas tinggi karena merupakan data resmi, serta mampu memberikan gambaran makro/menyeluruh terhadap sebuah fenomena dalam satu tahun pengukuran.

c. **Focus Group Discussion (FGD)**

Focus Group Discussion (FGD) merupakan tahapan pengumpulan data kualitatif. Metode ini digunakan untuk melakukan validasi silang data kuantitatif yang sudah dikumpulkan. Tujuan FGD IDI:

- Mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang telah berhasil dikumpulkan melalui reviu media dan dokumen.
- Eksplorasi dan menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui reviu media dan reviu dokumen.

Pengukuran Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi dilakukan dengan menggunakan 8 Indikator yang terkait dengan bidang politik. Adapun indikator penilaian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3.7
Sumber Data Penilaian IDI
pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi

No.	Indikator	Sumber Data			
		Surat Kabar	Portal Berita Online	Dokumen/Data K/L/D/I	FGD
1	2	3	4	5	6
1	Kinerja Lembaga Legislatif			√	
2	Kinerja Lembaga Yudikatif			√	
3	Netralitas Penyelenggara Pemilu			√	
4	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah			√	
5	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat			√	
6	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah			√	
7	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik			√	
8	Pendidikan Politik pada kader partai politik	√	√	√	√

Dari 8 (delapan) indikator diatas, sebanyak 1 (satu) indikator yang dapat menunjang program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, antara lain: Indikator Pendidikan Politik pada kader partai politik merupakan acuan dari Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

Dalam upaya pencapaiannya Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Program tersebut terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yakni:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Dearah. Sub kegiatan :
 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Hasil penilaian skor Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi yang merupakan salah satu aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 yang dirilis oleh BPS RI adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Hasil penilaian skor Aspek Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi
Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023

No	Indikator	Capaian 2023
1	2	3
1	Kinerja Lembaga Legislatif	71,43
2	Kinerja Lembaga Yudikatif	85,33
3	Netralitas Penyelenggara Pemilu	77,27
4	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	72,73
5	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	75,47
6	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	100,00
7	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	80,00
8	Pendidikan Politik pada kader partai politik	100,00

Adapun gambaran pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya partisipasi politik masyarakat, sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.9
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	77,95	83,00	106,48%

Berdasarkan data diatas, perbandingan antara target dan realisasi dapat dilihat bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Kalimantan Timur persentase capaian kinerja sebesar 106,48%, capaian tersebut dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

- a. Target sasaran pada tahun 2024 tercapai sebesar 83,00. Dengan demikian, persentase realisasi terhadap target adalah sebesar 106,48% (terlampau).
 - b. Realisasi capaian indikator pada tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan angka capaian di tahun 2023 karena Tahun 2024 merupakan awal dari Tahun Renstra periode 2024-2026.
2. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2026 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan ini untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan. Perbandingan realisasi kinerja Badan Kesbangpol Prov. Kaltim tahun 2024 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Prov. Kaltim periode 2024-2026 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2026)	Realisasi (Th. 2024)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	78,05	83,00	106,34%

Pada tabel 3.10 dapat dilihat bahwa terjadi kemajuan yang signifikan pada indikator kinerja Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi, realisasi mencapai 83,00 dengan tingkat kemajuan 106,34%, hal ini tentu akan menjadi bahan acuan dalam menentukan target renstra selanjutnya.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional

Perbandingan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan realisasi standar Nasional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi
Nasional/Standar Nasional Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	Lebih/Kurang
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	83,00	77,20	5,8%

Pada tabel 3.11 dapat dilihat bahwa terdapat kemajuan yang sangat signifikan pada indikator kinerja Kapasitas Lembaga Demokrasi, perbandingan realisasi capaian secara nasional dengan tingkat kelebihan 5,8%.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Faktor Pendukung keberhasilan:

Dalam upaya mencapai sasaran strategis pertama : meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penyelenggaraan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya, terdapat beberapa faktor kunci yang dapat mendukung yaitu:

1. Memperkuat kemandirian Partai Politik (Parpol), melalui Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebesar Rp.5000,- (lima ribu) per suara sah. Bantuan Keuangan Partai Politik melalui APBD yang diberikan dalam kurun waktu tahun 2024 kepada Parpol sejumlah Rp8.622.425.000,-. Pencairan bantuan keuangan Parpol tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.217/2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Kalimantan Timur Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

Tabel 3.12
Rincian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Yang Mendapatkan Kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tahun 2024

No	Penerima Bantuan	Perolehan Kursi	Perolehan Suara	Nilai Per Suara (Rp)	Peresmian Anggota DPRD Lama (8 bulan di th 2024)	Jumlah Bantuan (Rp)
1	2	3	4	5		6
1	Partai Golkar	12	350.126	5.000	02 September 2019	1.167.090.000
2	Partai PDIP	11	283.726	5.000	02 September 2019	945.755.000
3	Partai Gerindra	8	223.738	5.000	02 September 2019	745.795.000
4	Partai PKS	4	151.374	5.000	02 September 2019	504.580.000
5	Partai Demokrat	3	122.576	5.000	02 September 2019	408.590.000
6	Partai PAN	5	119.562	5.000	02 September 2019	398.540.000
7	Partai PKB	5	114.241	5.000	02 September 2019	380.805.000
8	Partai PPP	4	100.768	5.000	02 September 2019	335.895.000
9	Partai Nasdem	2	95.159	5.000	02 September 2019	317.200.000
10	Partai Hanura	1	63.469	5.000	02 September 2019	211.565.000
Jumlah		55	1.624.739			5.415.815.000

Tabel 3.13
Rincian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Yang Mendapatkan Kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Penerima Bantuan	Perolehan Kursi	Perolehan Suara	Nilai Per Suara (Rp)	Peresmian Anggota DPRD Lama (4 bulan di th 2024)	Jumlah Bantuan (Rp)
1	2	3	4	5		6
1	Partai Golkar	15	512.660	5.000	02 September	854.435.000

					2024	
2	Partai PDIP	9	322.075	5.000	02 September 2024	536.795.000
3	Partai Gerindra	10	342.752	5.000	02 September 2024	571.255.000
4	Partai PKS	4	151.666	5.000	02 September 2024	252.780.000
5	Partai Demokrat	2	108.234	5.000	02 September 2024	180.390.000
6	Partai PAN	4	117.107	5.000	02 September 2024	195.180.000
7	Partai PKB	6	159.394	5.000	02 September 2024	265.660.000
8	Partai PPP	2	84.686	5.000	02 September 2024	141.145.000
9	Partai Nasdem	3	125.380	5.000	02 September 2024	208.970.000
Jumlah		55	1.923.954			3.206.610.000

Gubernur Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun anggaran 2024 juga memberikan bantuan keuangan dalam bentuk belanja hibah uang kepada penyelenggara pemilu dan hibah uang kepada Pengamanan Pemilu/Pilkada 2024 yakni pemerintah pusat, rincian anggaran adalah sbb:

Tabel 3.14
Rincian Bantuan Keuangan Penyelenggara Pemilu dan Pengamanan
Pemilu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Penerima Hibah	Besar Bantuan	Keterangan
1	2	3	4
Penyelenggara Pemilu			
1	KPU Provinsi Kalimantan Timur	180.549.170.763	
2	Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	80.405.197.200	
Pengamanan Pemilu			
1	Kepolisian Negara RI	52.309.309.000	
2	Kodam VI/Mulawarman	14.003.454.954	
3	Komando Resor Militer 091/ASN	22.740.711.500	
4	Pangkalan TNI AL Balikpapan	5.059.850.000	
Jumlah		355.067.693.417	

2. Pelaksanaan Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan lancar berkat adanya kolaborasi dan

sinergi antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan berbagai instansi vertikal penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu Prov Kaltim), dan FORKOPIMDA Prov Kaltim. Pada September 2024 di Hotel Mercure Samarinda, Badan Kesbangpol berkolaborasi dengan Forkopimda dan penyelenggara pemilu menyelenggarakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi Menuju Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Kalimantan Timur sebagai bentuk komitmen seluruh jajaran pemangku kepentingan untuk turut serta mendukung pelaksanaan Pemilu yang damai, adil, bermartabat, dan tetap menjunjung nilai-nilai kearifan lokal.

Faktor Penghambat keberhasilan:

Selain faktor kunci pendukung keberhasilan, Badan Kesbangpol juga menghadapi beberapa kendala dan hambatan dalam proses pencapaian kinerja sasaran, yaitu pada awal Tahun 2024, menjelang penyelenggaraan Pilkada serentak November 2024, suhu perpolitikan di wilayah Prov Kaltim berangsur mengalami peningkatan yang disebabkan oleh sudah dimulainya fase kampanye politik dan mulai maraknya geliat Gerakan masyarakat yang menunjukkan keberpihakannya pada calon peserta pemilu tertentu.

Alternatif solusi yang telah dilakukan dan kegiatan yang akan dilakukan kedepan

Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik beserta jajaran, Badan Kesbangpol Kab/Kota, Pokja Indeks demokrasi Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Selanjutnya upaya dalam Pencapaian dan Tindak Lanjut Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi Kalimantan Timur ke depan, antara lain:

1. Pemberian hibah bantuan keuangan partai politik dan evaluasi penggunaan bantuan keuangan partai politik.
2. Pengembangan literasi politik bagi masyarakat dan pengurus lembaga demokrasi serta penerapan best practice dialog politik dan pendidikan politik.

3. Kaderisasi partai perlu ditingkatkan, antara lain melalui pendidikan politik yang direncanakan dengan baik, integrasi antara aktivitas kaderisasi dengan dana bantuan partai politik.
 4. Pemanfaatan sistem informasi dengan pembangunan dan pengembangan sistem pelaporan situasi politik dalam negeri berbasis digital.
 5. Pasca penerapan IDI Metode Baru, peran Kesbangpol sebagai Pembina untuk menjadikan Pokja IDI sebagai prioritas dan memaksimalkan masing-masing peran yang telah ditentukan.
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan capaian Sasaran 1, dengan Indikator kinerja Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh keberhasilan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.15
Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran
1 : Meningkatnya partisipasi politik masyarakat

No	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1,30%	1,16%	89,34%
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis	4 dokumen	4 dokumen	100,00%
		Pelaksanaan	Jumlah Orang	3.171	4184	131,95%

		Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang	orang	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 laporan	4 laporan	100,00%

Capaian kinerja Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik pada Tahun 2024 mencapai sebesar 89,34%. Capaian persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pendidikan Politik dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak Tahun 2024 sebanyak 11 kali, kegiatan sosialisasi Netralitas ASN dan Non ASN sebanyak 2 kali, kegiatan Workshop Bantuan Keuangan Parpol sebanyak 2 kali, kegiatan FGD Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebanyak 5 kali, kegiatan FGD Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah (TP3D) sebanyak 5 kali, kegiatan Konsolidasi Demokrasi Menuju Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 1 kali, kegiatan Silaturahmi Partai

Politik sebanyak 1 kali dan kegiatan Penguatan Partai Politik sebanyak 1 kali.

Gambar 3.1
Kegiatan Sosalisasi Pendidikan Politik



Gambar 3.2 Kegiatan FGD IDI



Gambar 3.3
Kegiatan FGD Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah (TP3D)



6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran strategis dari sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024, dapat mendukung efisiensi dalam kelancaran pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tabel 3.16
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	106,48%	99,79%	6,69%

Sasaran 2 : Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja yaitu Jumlah Potensi Konflik, meta indikator sebagai berikut:

Tabel 3.17
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah Potensi Konflik	Capaian Jumlah Potensi Konflik Rumus Capaian : $\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$

Adapun gambaran pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat, sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.18
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Potensi Konflik	Jumlah	100	19	181%

Berdasarkan data diatas, Indikator Jumlah Potensi Konflik bermakna negatif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, perbandingan antara target dan realisasi dapat dilihat bahwa

capaian indikator kinerja jumlah potensi konflik mencapai sebesar 181%, capaian tersebut dapat dikategorikan **Sangat Baik**. Capaian sangat baik tersebut menunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan yang berlatar belakang isu ideologi, politik, sosial dan budaya di Provinsi Kalimantan Timur tidak banyak menimbulkan potensi konflik yang akan berdampak terhadap gangguan keamanan. Dengan rendahnya potensi konflik dapat dinyatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur dalam keadaan kondusif pada tahun 2024.

Berikut daftar data jumlah Potensi Konflik yang ada di Provinsi Kalimantan Timur :

Tabel 3.19
Daftar Data Potensi Konflik Tahun 2024

No	Wilayah	Potensi Konflik	Jenis Potensi Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kota Samarinda	1 Klaim lahan Gereja Toraja Jemaat Samarinda Baru Jl. Air Terjun RT 18 Samarinda Seberang oleh dr. Very Rabang	Sosbud	Pengurus Gereja Toraja sudah membuat pengaduan ke kepolisian
		2 Aliansi Nasional Anti Syiah menolak keberadaan Aliran Islam Syiah dengan alasan menyimpang dari ajaran Islam	Sosbud	Basis Syiah berada di Jl, Pramuka Yayasan alqoyum pimpinan Habib Ahmad
		3 Permasalahan pasar sementara eks. Pemotongan Hewan Dinas Prov. Kaltim	Sosbud	Dalam proses pengadilan
2	Kota Bontang	4 Gugatan Pemerintah Kota Bontang tentang Tapal Batas Sidrap	Sosbud	Menunggu Hasil Keputusan MK
		5 Polemik Pro dan Kontra Bangunan Tugu Tongkonan Kandaeng Dulang yang berada di Kel.Kanaan Kec Bontang Barat Kota Bontang	Sosbud	Masih dalam proses dengan Lembaga Adat Kuta Bontang, Lembaga Adat Toraja Bontang dan Dewan Adat Dayak Bontang yang mendukung Kebijakan Pemerintah
		6 Kasus perkelahian dengan senjata tajam (pisau dapur) yang mengakibatkan terjadinya penikaman di Pasar Rawa Indah RT.17 Kel.Tanjung Laut Indah Kec.Bontang Selatan Kota Bontang	Sosbud	Tersangka sudah ditemukan walaupun tersangka sempat melarikan diri dan sekarang dalam proses dikepolisian

3	Kabupaten Kutai Kartanegara	7	Klaim Lahan di wilayah KM 27 Jl. Poros Samarinda – Bontang Kec. Marang Kayu antara Kelompok Lasade CS dengan Kelompok Gazali CS	Sosbud	Sudah difasilitasi oleh Polsek Marangkayu namun belum ada tindak lanjut.
		8	Penolakan warga terhadap Pembangunan Gereja HKBP Desa Loa Duri Kec. Loa Janan Kukar	Sosbud	Belum ada tindak lanjut setelah mediasi oleh pihak Desa Loa Duri dan laporan perkembangannya
		9	Klaim lahan oleh ahli waris A.P Sosro Negoro dengan PT. MHU seluas 1.300, meminta konpensasi	Sosbud	Belum ada laporan perkembangan
		10	Ajaran agama menyimpang dari ajaran Islam di Yayasan kencana unggul oleh sdri Sugiarti Jl. Naga RT. 14 Kel, Timbau Kec. Tenggarong	Sosbud	Belum ada laporan tindak lanjut.
		11	Ajaran Asnawi Bin Hamzah di Kec. Anggana Kab. Kukar yang mengatakan bahwa Al Quran adalah 41 juz bukan 30 juz sehingga menjadi polemik dimasyarakat	Sosbud	Sudah sepakat Damai
4	Kabupaten Paser	12	Potensi Konflik lahan antara kelompok Ali Busro dengan warga transmigrasi suku NTT desa krayan sentosa Kecamatan Long Ikis	Sosbud	Masih berlanjut belum selesai
		13	Penyetopan kegiatan houling batu bara yang menggunkan jalan umum oleh warga desa batu kajang.	Sosbud	Sudah dilakukan mediasi yang di fasilitasi oleh Polres, Forkopimcam, DPRD, dan OPD terkait namun belum ada penyelesaian karena menunggu keputusan pemerintah Prov. Kaltim sebagai penggungjawab jalan negara Kaltim - Kalsel.
		14	Pencemaran lingkungan (Sungai) oleh PT Saraswanti Sawit Makmur di Kecamatan Batu Engau yang mengakibatkan banyak ikan-ikan yang mati dan aroa air anak Sungai yang menuju Sungai besar sangat berbau dan tercemar dan hal ini terjadi sudah bertahun-tahun	Sosbud	Dalam proses mengecek di DLH
		15	Penolakan Pembentukan Lembaga Adat Nusantara di IKN oleh Musa Ketua Lembaga Adat Paser (LAP)	Sosbud	Belum ada tindak lanjut

		16	Pembunuhan oleh orang yang tidak dikenal di posko stop houling yang melewati jalan umum di Muara Kate pada Jumat dini hari, dan saat ini satu orang tokoh atas nama Bapak Anson masi dalam keadaan kritis di RSUD sedangkan Bapak Russel meninggal dunia. Bapak Russel dan Bapak Anson adalah beberapa dari tokoh Masyarakat dan tokoh adat Desa Muara Langon yang sangat vocal menolak kegiatan holing batu bara pasca meninggalnya pendeta Pronika karena terlindas truk batu bara pada Oktober 2024 yang lalu.	Sosbud	Belum ditemukan pelaku pembunuhan, dalam penanganan kepolisian
5	Kabupaten Berau	17	Potensi konflik antar masyarakat pada pemilihan kepala Kampung setiap 6 tahun.	Sosbud	Perkembangan belum dilaporkan
		18	Potensi konflik antar perusahaan dengan masyarakat disektor perkebunan kelapa sawit yang banyaknya perusahaan membangun pabrik dengan menguasai dan mengembangkan lahan menjadi perkebunan sawit hal ini dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat baik penyerobotan dan kecemburuan sosial.	Sosbud	Perkembangan belum dilaporkan
		19	Tapal batas wilayah antar kabupaten yang berlarut berdampak pada status kependudukan dan status tanah masyarakat sehingga berpontesi saling klaim antar warga.	Sosbud	Perkembangan belum dilaporkan

2. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2026 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan ini untuk mengetahui apakah sasaran startegis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan. Perbandingan realisasi kinerja Badan Kesbangpol Prov. Kaltim tahun 2024 dengan Rencana Startegis (Renstra) Badan Kesbangpol Prov. Kaltim periode 2014-2026 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2026)	Realisasi (Th. 2024)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud	Jumlah Potensi	80	19	176,25%

Pada tabel 3.20 dapat dilihat bahwa perbandingan yang signifikan pada indikator kinerja Jumlah potensi konflik ipoleksosbud, realisasi kinerja Tahun 2024 sebesar 19 dengan tingkat kemajuan 176,25%, hal ini tentu akan menjadi bahan acuan dalam menentukan target renstra selanjutnya.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun anggaran 2024 tidak menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat oleh karena itu tidak terdapat indentifikasi (nihil).

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor Pendukung keberhasilan:

- a. Adanya pola komunikasi dan koordinasi yang baik antara Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur dengan forum-forum kemitraan FORKOPIMDA, FKUB, FPK, dan FKDM.
- b. Diterbitkannya Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Forum Penguatan Pendidikan Kebangsaan serta Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 47 tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang dapat menjadi acuan/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penguatan pendidikan wawasan kebangsaan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Adanya sinergi yang terbangun antara Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur dengan Badan Kesbangpol kabupaten/kota, BNNP Provinsi Kalimantan Timur, serta pemangku kepentingan terkait,

sehingga dapat terlaksana berbagai kegiatan pencegahan penanganan penyalahgunaan narkoba yang saat ini masih menjadi salah satu prioritas Pemda Provinsi Kalimantan Timur. Dalam prosesnya, pada Tahun 2023 dibentuk Pengankatan Relawan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang merupakan wujud komitmen dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

- d. Adanya berbagai forum komunikasi yang bergerak dalam hal harmonisasi dan toleransi serta memperkuat moderasi beragama di Provinsi Kalimantan Timur, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkup akademisi yang diharapkan dapat meningkatkan rasa toleransi antar masyarakat serta memelihara kerukunan antar umat beragama dengan lebih intensif di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Faktor Penghambat keberhasilan:

Selain faktor kunci pendukung keberhasilan, Badan Kesbangpol juga menghadapi beberapa kendala dan hambatan dalam proses pencapaian kinerja sasaran, antara lain:

- a. Masih adanya ancaman berupa penyebaran paham-paham yang berusaha mengubah paradigma masyarakat Provinsi Kalimantan Timur untuk tidak turut serta melestarikan nilai luhur beretika dan budaya asli bangsa.
- b. Adanya perubahan dan perkembangan teknologi yang telah memudahkan nilai nilai luhur Pancasila yang berujung pada dekadensi moral atau pengikisan jati diri bangsa. Hal ini harus menjadi perhatian bersama oleh seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan PPWK, khususnya yang mengarah pada pendidikan karakter demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
- c. Adanya dinamika perubahan kebijakan nasional yang turut mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Di sisi lain, masih ditemui beberapa permasalahan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, utamanya yang

berkaitan dengan izin pendirian rumah ibadah, serta isu ketimpangan ekonomi yang sampai saat ini masih menimbulkan berbagai gesekan/potensi konflik di masyarakat.

- d. Pendidikan moral dan pembangunan karakter merupakan proses panjang yang bertahap dan kontinyu sehingga memerlukan kerja sama yang lebih luas dan mendalam dari seluruh unsur dan lapisan masyarakat.

Alternatif solusi yang telah dilakukan dan kegiatan yang akan dilakukan kedepan

- a. Lebih meningkatkan sinergitas dengan Kesbangpol Kabupaten/Kota dalam hal penyusunan rencana aksi tim terpadu penanganan konflik sosial dan perekapan laporan potensi konflik di lapangan.
 - b. Dalam upaya deteksi dini lebih mengoptimalkan peran forum bentukan pemerintah.
 - c. Mengoptimalkan sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan kepada pelajar dan masyarakat, memperdayakan rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai tempat yang efektif dalam menyampaikan pesan perdamaian dan cinta NKRI.
 - d. Menjalin komunikasi efektif dengan komunitas intelijen di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan capaian Sasaran 2, dengan Indikator kinerja Jumlah potensi konflik ipoleksosbud didukung oleh keberhasilan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.21
Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap
Sasaran 2 : Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Masyarakat

No	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan		Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan	100%	83,33%	83,33%

	Karakter Kebangsaan		penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan			
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6 dokumen	5 dokumen	83,33%
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10910 orang	6537 orang	59,92%
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 laporan	4 laporan	100,00%
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	120 orang	0 orang	0%
		Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan	4 laporan	2 laporan	50%

		burnapaskibraka	Hasil Pembinaan Burnapaskibraka			
		Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Pelaksanaan tugas Burnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Burnapaskibraka Duta Pancasila	11 laporan	11 laporan	100%
		Pembinaan Lanjutan kepada Burnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Burnapaskibraka Duta Pancasila	3 laporan	3 laporan	100%
		Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	40	40	100%
2	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	31,21%	21,47%	68,79%
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	3 dokumen	3 dokumen	100%
		Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2355 orang	1765 orang	74,95%
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 laporan	4 laporan	100%
3	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan	100%	100%	100%

			ekonomi, sosial, budaya, dan agama			
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2000 orang	1310 orang	65,50%
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 laporan	4 laporan	100%
4	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	100%	100%	100%
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8 dokumen	8 dokumen	100%
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama	2290 orang	1463 orang	63,89%

		Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 laporan	4 laporan	100%
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi"	12	0	0%

1. Capaian Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kinerja Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan pada tahun 2024 didasarkan atas capaian indikator kinerja persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan. Persentase ketercapaian indikator kinerja ini adalah sebesar 83,33%. Program ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsolidasi forum pembauran kebangsaan (FPK) sebanyak 8 kali, kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan bagi organisasi kepemudaan, pemuka masyarakat, dan bagi mahasiswa sebanyak 5 kali, kegiatan pembauran kebangsaan bagi generasi muda (pelajar, mahasiswa dan

pramuka) sebanyak 1 kali, kegiatan revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter sebanyak 1 kali, dan kegiatan sosialisasi paskibraka dan pembentukan paskibraka sebanyak 17 kali.

Gambar 3.4
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi FPK



Gambar 3.5
Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Bagi Organisasi Kepemudaan, Pemuka Masyarakat, Dan Bagi Mahasiswa



A man in a light blue shirt is speaking at a podium. Behind him is a green banner with white text that reads "KEMAH DAN YOUTH UNITED TIONG" and "FINAL REVOLUSI MENTAL" and "PANCASIL" and "BUPAYA MENCA" and "MAY 2015". There are two microphones in front of him. To the right, there is a grey curtain and a table with a water bottle and a glass.

Kinerja program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan pada tahun 2024 didasarkan atas capaian indikator kinerja persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif. Persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 68,79%. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan verifikasi data ormas sekalitum sebanyak 2 kali, kegiatan podcast/talkshow dengan ormas sebanyak 3 kali, kegiatan pembinaan dan pemberdayaan organisasi masyarakat terkait pilkada serentak, wawasan kebangsaan, dan peningkatan kewaspadaan nasional sebanyak 3 kali, dan kegiatan rapat tim terpadu pengawasan ormas sebanyak 1 kali.

Gambar 3.8 Kegiatan Podcast/talkshow dengan Ormas

Gambar 3.9
Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi MasyarakatGambar 3.10
Kegiatan Rapat Tim Terpadu Pengawasan Ormas

3. Capaian Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.

Kinerja program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya pada tahun 2024 didasarkan atas capaian indikator kinerja persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Persentase ketercapaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100%. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya diwujudkan melalui pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Teknologi kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk menggunakan E-catalog sebanyak 1 kali, Kegiatan Sosialisasi Ketahanan Seni dan Budaya di Daerah sebanyak 1 kali, Kegiatan Pemeliharaan Keharmonisan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Daerah sebanyak 1 kali, dan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN & PN) kepada Pemuda, Tokoh Agama dan Ormas sebanyak 1 kali, Kegiatan Rapat Tim Terpadu Penanganan dan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama di Daerah sebanyak 1 kali, dan kegiatan Rapat Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN & PN) sebanyak 1 kali.

Gambar 3.11
Kegiatan Sosialisasi UMKM



Gambar 3.12
Kegiatan Sosialisasi Ketahanan Seni dan Budaya



Gambar 3.13 Kegiatan Pemeliharaan Keharmonisan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Daerah



Gambar 3.14 Kegiatan Sosialisasi P4GN & PN kepada Pemuda, Tokoh Agama dan Ormas



Gambar 3.15 Kegiatan Rapat Tim Terpadu Penanganan dan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama



4. Capaian Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Kinerja program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial pada tahun 2024 didasarkan atas capaian indikator kinerja persentase potensi konflik sosial yang ditangani. Persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100%. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Prov. Kaltim sebanyak 4 kali, kegiatan Diseminasi Manajemen Konflik Bagi Aparatur Pemerintah Di Wilayah Kaltim sebanyak 3 kali, Sosialisasi Peran Intelektual Muda Dalam Pencegahan Radikalisme dan Terosisme di Kalimantan Timur sebanyak 2 kali, kegiatan Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 3 kali, kegiatan Rapat Tim Pemantauan Orang Asing, Lembaga/ Organisasi Asing, Tenaga Kerja Asing Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 2 kali, kegiatan Rapat Tim Pemantauan Orang Asing, Lembaga/ Organisasi Asing, Tenaga Kerja Asing Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 1 kali, kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Intelijen sebanyak 1 kali, dan kegiatan Focus Group Discussion Pemantauan Orang Asing dan forum group discussion Kewaspadaan Nasional sebanyak 2 kali.

Gambar 3.16
Kegiatan Diseminasi Manajemen Konflik Bagi Aparatur
Pemerintah Di Wilayah Kaltim



Gambar 3.17 Kegiatan Sosialisasi Peran Intelektual Muda Dalam
Pencegahan Radikalisme dan Terosisme di Kalimantan Timur



Gambar 3.18 Kegiatan Forum Group Discussion (FGD)
Pemantauan Orang Asing



Gambar 3.19 Kegiatan FGD Kewaspadaan Nasional



6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran strategis dari sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024, dapat mendukung efisiensi dalam kelancaran pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tabel 3.22
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	181%	67,95%	113,05%

Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, meta indikator sebagai berikut:

Tabel 3.23
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Capaian IKM Kesbangpol
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai SAKIP Kesbangpol

Adapun gambaran pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah, sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.24
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	75,00	91,73	122,31%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	68,00	70,20	103,23%

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

Berdasarkan data diatas, perbandingan antara target dan realisasi dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah capain kinerja sebesar 122,31%, capaian tersebut dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

Capaian indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual dan onlie yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pelaksanaan pelayanan publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, secara umum mencerminkan tingkat kualitas dengan kategori Sangat Baik dengan nilai SKM 91,73 sehingga dapat menunjukkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2024 tercapai dengan Sangat Baik. Nilai SKM semester I tahun 2024 sebesar 89,89 dengan jumlah responden sebanyak 71 orang, pada semester II tahun 2024 sebesar 93,57 dengan jumlah responden sebanyak 80 orang.

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan data diatas, perbandingan antara target dan realisasi dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas perangkat daerah capain kinerja sebesar 103,23%, capaian tersebut dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

Capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas perangkat daerah diperoleh dari hasil penilaian dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 70,20 (tujuh puluh koma dua kosong) atau dengan predikat penilaian “BB” dengan interprestasi “Sangat Baik”.

2. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2026 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan ini untuk mengetahui apakah sasaran startegis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan. Perbandingan realisasi kinerja Badan Kesbangpol Prov. Kaltim tahun 2024 dengan Rencana Startegis (Renstra) Badan Kesbangpol Prov. Kaltim periode 2014-2026 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.25
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2026)	Realisasi (Th. 2024)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	76,00	91,73	120,70%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	69,00	70,20	101,73%

Pada tabel 3.25 dapat dilihat bahwa terjadi kemajuan yang signifikan pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat

Daerah dan Indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, realisasi kinerja masing-masing mencapai 91,73 dan 70,20 dengan tingkat kemajuan 120,70% dan 101,73%, hal ini tentu akan menjadi bahan acuan dalam menentukan target renstra selanjutnya.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun anggaran 2024 tidak menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat oleh karena itu tidak terdapat indentifikasi (nihil).
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung keberhasilan:

- a. Adanya komitmen yang kuat, baik di jajaran pimpinan maupun seluruh pegawai di Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya meningkatkan transformasi/reformasi birokrasi.
- b. Terjalannya pola komunikasi dan koordinasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan di lingkup Pemda Provinsi Kalimantan Timur maupun dengan instansi vertikal dalam upaya memaksimalkan proses perencanaan, evaluasi, dan penilaian kinerja Badan Kesbangpol.
- c. Kolaborasi dan sinergi lintas bidang di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur terjalin dengan baik sehingga kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
- d. Sinergi yang terbangun di lingkup Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur juga berperan besar dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik.
- e. Adanya peningkatan dalam pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan keuangan, dalam hal ini Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 memperoleh Penghargaan Peringkat Pertama Kategori Pengelolaan Keuangan dan Penghargaan Peringkat Pertama Pengelolaan Kepegawaian dari Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 3.20 Penghargaan Peringkat Pertama Kategori Pengelolaan Keuangan



Gambar 3.21 Penghargaan Peringkat Pertama Kategori Pengelolaan Kepegawaian



Faktor Penghambat keberhasilan:

- a. Dalam upaya mewujudkan transformasi digital, masih terdapat keterbatasan sumber daya terutama dari sisi website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang masih memerlukan banyak pengembangan.
- b. Berkaitan dengan kantor Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan saat ini masih menumpang di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, kondisi ini menyebabkan beberapa peralatan dan perlengkapan kantor yang tidak memiliki tempat yang

memadai sehingga belum dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan operasional kantor serta pelaksanaan pelayanan publik.

- c. Keterbatasan sumber daya manusia semakin berkurang, sampai dengan tahun 2024 beberapa pegawai memasuki purna tugas tetapi belum ada penambahan pegawai.

Alternatif solusi yang telah dilakukan dan kegiatan yang akan dilakukan kedepan

- a. Mengembangkan sistem mekanisme dan prosedur yang praktis dan efisien dengan meningkatkan sistem mekanisme dan prosedur berupa sistem aplikasi untuk mempermudah pelayanan diantaranya website Kesbangpol dan aplikasi giok mas.
 - b. Menyiapkan ruang konsultasi dan pengaduan di dalam standar pelayanan (pelayanan pengaduan).
 - c. Menindaklanjuti semua rekomendasi SAKIP Inspektorat yang dilengkapi dengan bukti dukung yang relevan.
 - d. Menyusun kebijakan internal mengadopsi Pergub Budaya Kerja No 30 Thn 2024 (yang memuat diantaranya kriteria atas pengukuran kinerja dalam pemberian reward dan punishment).
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan capaian Sasaran 3, dengan Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah dan Indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh keberhasilan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.26
Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran
3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik
Perangkat Daerah

No	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	78,63	78,84	100,27%
			Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran	100%	100%	100%

	Perangkat Daerah	yang ditetapkan tepat waktu			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	2 laporan	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah"	4 laporan	4 laporan	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	96,50%	97,27%	100,80%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	45 orang	40 orang	88,89%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	100%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	30%	30%	100%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	2 laporan	100%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,00	2,00	100,00%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	33%	32,65%	98,95%

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	3 paket	100,00%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 dokumen	49 dokumen	81,67%
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	60 dokumen	49 dokumen	81,67%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 pegawai	1 pegawai	35,56%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	95%	97,94%	103,09%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 paket	15 paket	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	6 laporan	100%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	1 dokumen	20%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	100%	100%	100%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 unit	7 unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan	13 laporan	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	81,04%	81,04%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	13 unit	100%

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61 unit	30 unit	49,18%
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	10 unit	5 unit	50%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	5 unit	100%

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja program Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan dan Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti pada tahun 2024 persentase capaian indikator kinerja ini adalah masing-masing 100,27% dan 100%. Adapun program kerja yang termasuk ke dalam program ini, antara lain kegiatan kesekretariatan, yang di dalamnya mencakup kegiatan penyediaan operasional kantor serta kegiatan lain yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat dan nilai Akuntabilitas Kinerja, antara lain:

- Tindak lanjut dan perbaikan atas hasil revidi Sistem AKIP oleh Inspektorat.
- Melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi rencana aksi dengan menyajikan data permasalahan, rekomendasi dan tindak lanjut.
- Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), yakni proses pengumpulan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini adalah Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur, dan telah dilaksanakan pada tahun 2024.

Gambar 3.22 Kegiatan Monitoring Evaluasi Rencana Aksi



Gambar 3.23 Kegiatan Pelayanan Publik



6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran strategis dari sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024, dapat mendukung efisiensi dalam kelancaran pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tabel 3.27
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan public perangkat daerah	112,77%	87,60%	25,17%

D. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini disajikan realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mempunyai satu Sasaran Strategis yang harus dilaksanakan. antara lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.28
Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	77,95	83,00	106,48%	420.471.468.517	419.599.706.808	99,79%
2	Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud	100	19	19%	27.812.001.213	18.897.996.213	67,95%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	75,00	91,78	122,37%	25.677.928.228	22.493.193.422	87,60%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	68,00	70,20	103,24%			
Jumlah						473.961.397.958	460.955.419.923	97,26%
Total Belanja Modal						57.008.743.142	56.357.100.000	98,86%

2. Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan

Adapun realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kaltim tahun 2024 dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 3.29
Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran			Ket
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.677.928.228	22.493.193.422	87,60%	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	635.380.000	506.813.588	79,77%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	153.282.000	113.201.800	73,85%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	47.662.000	0	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.842.000	0	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.542.000	0	0,00%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	408.052.000	393.611.788	96,46%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.083.712.146	10.299.194.376	92,92%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.423.471.146	9.765.567.276	93,69%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	472.080.000	472.080.000	100,00%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.732.000	0	0,00%	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.015.000	0	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	178.812.000	61.547.100	34,42%	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.602.000	0	0,00%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.703.000	0	0,00%	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.414.000	0	0,00%	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	921.000	0	0,00%	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.684.000,00	0	0,00%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.684.000	0	0,00%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	488.727.000	268.315.000	54,90%	

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	274.365.000	210.815.000	76,84%	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.114.000	0	0,00%	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.114.000	0	0,00%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.134.000	57.500.000	28,73%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.793.645.986	6.502.179.762	83,43%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.124.000	35.419.000	98,05%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.803.839.986	4.347.737.050	90,51%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	185.010.000	138.907.300	75,08%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.567.822.000	1.886.116.412	73,45%	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	200.850.000	94.000.000	46,80%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.370.611.000	2.323.060.000	97,99%	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.370.611.000	2.323.060.000	97,99%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.592.336.756	2.212.530.494	85,35%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.055.600	20.000.000	49,93%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	636.536.840	527.537.578	82,88%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.915.744.316	1.664.992.916	86,91%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	703.812.340	388.128.202	55,15%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.250.000	78.770.941	96,95%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202.343.000	110.382.261	54,55%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.600.000	11.400.000	28,08%	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	225.573.100	87.235.000	38,67%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	154.046.240	100.340.000	65,14%	
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	16.624.125.963	11.740.462.979	70,62%	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	16.624.125.963	11.740.462.979	70,62%	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3.073.122.900	2.342.845.397	76,24%	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	562.788.000	337.046.780	59,89%	
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	130.505.000	113.918.000	87,29%	
	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	147.745.000	0	0,00%	
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	3.369.539.500	1.383.765.000	41,07%	
	Pelaksanaan tugas Paskibraka	4.514.625.863	3.647.870.700	80,80%	
	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	2.245.956.100	1.946.650.791	86,67%	
	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1.718.720.000	1.381.467.500	80,38%	
	Pembentukan Paskibraka	861.123.600	586.898.811	68,16%	
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA	420.471.468.517	419.601.863.908	99,79%	APBD

	POLITIK				
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	420.471.468.517	419.601.863.908	99,79%	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	419.816.280.517	419.055.306.296	99,82%	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	655.188.000	546.557.612	83,42%	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	3.842.636.000	3.455.440.524	89,92%	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3.842.636.000	3.455.440.524	89,92%	
	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3.603.248.000	3.220.415.786	89,38%	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	239.388.000	235.024.738	98,18%	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.730.875.300	1.200.045.870	69,33%	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.730.875.300	1.200.045.870	69,33%	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.529.287.300	1.032.336.625	67,50%	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	201.588.000	167.709.245	83,19%	
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	5.614.363.950	2.502.046.840	44,57%	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5.614.363.950	2.502.046.840	44,57%	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.645.195.150	2.131.559.031	80,58%	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	352.788.000	347.434.763	98,48%	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2.616.380.800	23.053.046	0,88%	
	Total Belanja Daerah	473.961.397.958	460.955.419.923	97,26%	

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa realisasi per program kegiatan diatas 97,26% hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program kegiatan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran melalui DPA Murni dan Perubahan sebesar Rp473.961.397.958,- yang terdiri dari 2 (dua) jenis belanja yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp287.264.106.306,- yang diperuntukan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur. Proses penggunaan anggaran Belanja Operasi pada umumnya sudah berjalan sebagaimana jadwal yang direncanakan, hal ini terlihat dari realisasi penggunaan dana tidak mendapat kendala, realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp404.598.319.923,- atau 97,04%.
- b. Belanja Modal sebesar Rp3.040.762.151,- dimana sampai dengan 31 Desember 2024 semua program kegiatan telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100%. Dan realisasi keuangan sebesar Rp56.357.100.000- atau 98,86%.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Prov. Kaltim

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi Pemerintah atas petunjuk Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov. Kaltim yang mempunyai tugas membantu Gubernur Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilaksanakan dengan kategori **Sangat Baik**, hasil laporan akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah rata-rata capaian sebesar 128,27%, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan hasil yang optimal.

B. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Yang Akan Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur di masa mendatang antara lain yaitu:

1. Penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan kelompok kerja dan forum kemitraan.
2. Kolaborasi lintas sektor dengan para pemangku kepentingan dan instansi vertikal sebagai upaya preventif atas segala bentuk potensi instabilitas keamanan wilayah.

3. Upaya penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya pada kalangan remaja melalui kegiatan sosialisasi bahaya narkoba dan pembentukan satuan tugas anti narkoba.
4. Upaya minimalisasi tindak pelanggaran terhadap hak kebebasan berekspresi dan beragama di daerah yang dapat memicu timbulnya potensi konflik sosial.
5. Kolaborasi dengan berbagai elemen dalam rangka mengoptimalkan Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan guna mengantisipasi dan menangkal gejala atau potensi yang akan mengarah kepada timbulnya disintegrasi bangsa.
6. Mengoptimalkan kegiatan pembinaan dan pengawasan Ormas di Provinsi Kalimantan Timur guna meningkatkan keberdayaan dan kemandirian Ormas.
7. Meningkatkan upaya koordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi terkait, sehingga dapat mereduksi, mencegah, dan mengantisipasi segala kemungkinan negatif yang akan menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
8. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh, efektif, dan efisien.
9. Memperkuat komitmen dari semua Bidang untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur ini disampaikan, untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan di tahun-tahun mendatang.

Samarinda, 02 Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur

Drs. Sufian Agus. M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196602041988031016



LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Samarinda, Kalimantan Timur 75121

Telepon (0541) 733333; Faksimile (0541) 733453

Pos-el kesbangpolkaltim@gmail.com; Laman <http://kesbangpol.kaltimprov.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Sufian Agus, M.Si.

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si.

Jabatan : Pj. Gubernur Kalimantan Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA,
Pj. Gubernur Kalimantan Timur

Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si

PIHAK PERTAMA,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur

Drs. Sufian Agus, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660204 1988031 0 16

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

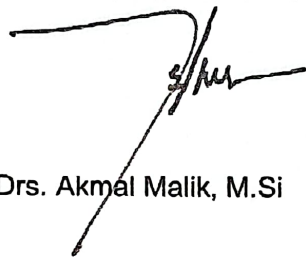
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	77,95%
2.	Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah potensi konflik ipoleksosbud	100 potensi konflik
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	75%
		Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	68%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 21.460.304.499,-	APBD
2.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 17.154.674.263,-	APBD
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp368.252.374.917,-	APBD
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 3.842.636.000,-	APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	Rp 1.430.888.900,-	APBD

	Program	Anggaran	Keterangan
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp 5.614.363.950,-	APBD
	JUMLAH	Rp417.755.242.529,-	APBD

Samarinda, 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA,
Pj. Gubernur Kalimantan Timur



Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si

PIHAK PERTAMA,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur



Drs. Sufian Agus, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660204 1988031 0 16

REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
Tahun : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	77,95%
2.	Meningkatnya Persatuan dan Kesatuan Masyarakat	Jumlah Potensi Konflik Ipoleksosbud	100
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	75%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	68%

Samarinda, 15 Oktober 2024

PIHAK KEDUA,
Pj. Gubernur Kalimantan Timur

Akmal Malik

PIHAK PERTAMA,
Kepala Badan

Drs. Sufian Agus, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19660204 1988031 0 16



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Samarinda, Kalimantan Timur 75121
Telepon (0541) 733333; Faksimile (0541) 733453
Pos-el kesbangpolkaltim@gmail.com; Laman <http://kesbangpol.kaltimprov.go.id>

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Sufian Agus, M.Si.

Jabatan : Kepala Badan

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Akmal Malik

Jabatan : Pj. Gubernur Kalimantan Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 15 Oktober 2024

PIHAK KEDUA,
Pj. Gubernur Kalimantan Timur

Akmal Malik

PIHAK PERTAMA,
Kepala Badan

Drs. Sufian Agus, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19660204 198803 1 016

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	77,95%
2.	Meningkatnya Persatuan dan Kesatuan Masyarakat	Jumlah Potensi Konflik Ipoleksosbud	100
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	75%
		Niai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	68%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 25.677.928.228,-	APBD-P
2.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 16.624.125.963,-	APBD-P
3.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp 420.471.468.517,-	APBD-P
4.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 3.842.636.000,-	APBD-P
5.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	Rp 1.730.875.300,-	APBD-P

	Program	Anggaran	Keterangan
6.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 5.614.363.950,-	APBD-P
	JUMLAH	Rp 473.961.397.958,-	APBD-P

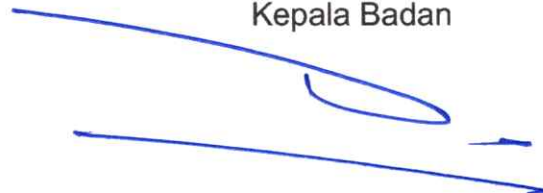
Samarinda, 15 Oktober 2024

PIHAK KEDUA,
Pj. Gubernur Kalimantan Timur



Akmal Malik

PIHAK PERTAMA,
Kepala Badan



Drs. Sufian Agus, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19660204 198803 1 016